

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan Pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa untuk bisa memenangi kompetisi global.

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2015-2019 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan

Dasar 9 Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar.

Kenaikan harga BBM beberapa tahun terakhir ini yang diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya, akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin. Hal tersebut lebih lanjut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (AKP). Pada Tahun 2015, AKP tingkat SMP sebesar 85,22% dan pada akhir 2010 telah mencapai 88,68%. Target penuntasan Wajar 9 tahun harus dicapai pada Tahun 2015/2019 dengan APK minimum 95%. Dengan demikian, pada saat ini masih ada sekitar 1,5 juta anak usia 13-15 tahun yang masih belum mendapatkan layanan pendidikan dasar. Selain masalah pencapaian target AKP, permasalahan lain yang dihadapi adalah masih rendahnya mutu pendidikan yang antara lain mencakup masalah tenaga kependidikan, fasilitas, manajemen, proses pembelajaran dan prestasi siswa. (Profil Pendidikan tahun 2010)

Dengan adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak, amanat undang-undang dan upaya tahun yang bermutu, Pemerintah melanjutkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri/Swasta dan Pesantren Salafiyah serta sekolah keagamaan non Islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tuntas dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun. Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini. Selain itu, Madrasah Diniyah Takmiliah (suplemen) juga tidak berhak memperoleh Bos, karena siswanya telah terdaftar di sekolah reguler yang telah menerima BOS.

Sejalan Visi Pembangunan Kota Binjai Tahun 2016-2021 : "***Terwujudnya Kota Cerdas Yang Layak Huni, Berdaya Saing Dan Berwawasan Lingkungan Menuju Binjai Yang Sejahtera***". Sedangkan Misi Kota Binjai adalah (1) Mewujudkan Pemerintahan yang cerdas (smart governance) melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintah kota yang bersih, efektif dan demokratis dan terpercaya, (2) Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas (*smart people*) dengan kualifikasi pintar, sehat, produktif dan sejahtera; (3) Mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat (*smart*

*mobility*) melalui kualitas infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat; (4) Meningkatkan perekonomian kota melalui peningkatan sumber daya alam berkelanjutan dan pengembangan sumberdaya manusia yang terampil, kreatif, inovatif dan produktif (*smart economy* dan *smart environment*); (5) Meningkatkan kualitas standar hidup (*smart living*) dalam aspek kelayakan kesejahteraan, keadilan

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan baik menyangkut aspek kelembagaan maupun teknis operasional.

Meningkatnya kebutuhan dalam pendidikan, mendorong pemerintah Indonesia menyalurkan berbagai bantuan demi kelangsungan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana bantuan operasional Sekolah (BOS) diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat dasar di Indonesia dengan tujuan meningkatkan beban biaya pendidikan demi tuntasnya wajib belajar sembilan tahun yang bermutu.

Namun kebijakan Dana BOS bukan berarti behentinya permasalahan pendidikan, masalah baru muncul terkait dengan penyelewengan dana BOS, dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS, tujuan dari pemerintah sendiri baik, namun terkadang sistem yang ada menjadi bumerang dan menghadirkan masalah baru, selain itu pribadi dan budaya manusia Indonesia ikut berpengaruh terhadap

penyelewengan dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama semua elemen dalam mewujudkan efektifitas pengelolaan dana BOS.

Dari banyaknya masalah yang diidentifikasi seperti yang disebutkan sebelumnya seperti kesesuaian dengan standar dan dan tujuan yang telah ditetapkan, masalah efisiensi penggunaan sumberdaya, masalah kesamaan antar kelompok yang berbeda dan ketepatan sasaran dan dapat memberikan dampak yang signifikan pada kelompok sasaran. Oleh karena itu, kami memilih untuk mengangkat masalah pengelolaan dana BOS serta permasalahannya, maka peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap keberhasilan program BOS khususnya pada SMP Negeri 1 Kota Binjai. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : “Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Di Kota Binjai, Studi pada SMP Negeri 1 Kota Binjai”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat meningkatkan pelayanan pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Binjai?.

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Binjai?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat meningkatkan pelayanan pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Binjai.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Binjai.

### **1.4. Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

- 1) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Keberhasilan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Binjai.
- 2) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khasanah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penelitian di bidang analisis kebijakan publik.